

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

## Harga Timah Dunia Ideal US\$ 15.000-20.000 Per Ton

JAKARTA— Harga timah dunia berpotensi naik ke kisaran US\$ 15.000-20.000 per ton, jika Indonesia bisa mengontrol pasokan timah dunia maksimal sekitar 30%. Saat ini, timah dunia diperdagangkan pada kisaran US\$ 10.000-11.350 per ton. Harga jual timah Indonesia sempat anjlok ke kisaran US\$ 6.450 per ton pada 30 Oktober 2005.

"Ketika banyak *smelter* timah beroperasi di Bangka Belitung dan menjual timah tanpa kontrol, pasokan timah Indonesia ke pasar dunia diperkirakan mencapai 40-45%, sekarang sudah turun karena penertiban. Harga timah bergerak di bawah US\$ 15.000 per ton, karena pasokan dari Indonesia yang berlebih," ujar Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia Herman Afif Kusumo kepada *Investor Daily* di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, saat ini Indonesia mencatat produksi timah sekitar 60.000 ton per tahun yang diproduksi oleh PT Timah Tbk 40.000 ton dan PT Koba Tin 20.000 ton. Sebelumnya, timah produksi pabrik pengolah bijih tambang (*smelter*) yang kemudian ditertibkan tidak tercatat dengan angka jelas.

Karena itu, dia juga sangat mendukung penertiban Kepolisian Daerah Bangka Belitung terhadap *smelter* yang izinnya menyalahi aturan dan tidak mempunyai wilayah kerja pertambangan. *Smelter* yang ditertibkan hanya mempunyai izin kerajinan produk pertambangan dari Departemen Perindustrian dan tidak mempunyai izin mengolah hasil bijih timah dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dia berpendapat, *smelter* juga lebih banyak merugikan bagi negara. Keberadaan mereka, ata Herman, tidak membeli nilai tambah berupa royalti dan pajak yang berarti bagi pendapatan negara dan merusak lingkungan.

"Jika penambangan PT Timah dan Kob Tin menambang dengan *good mining practice*, menggali dan kemudian mereklamasi wilayah tambangnya, kegiatan tambang rakyat dan ilegal tidak ada reklamasi," katanya.

Untuk kasus di Bangka Belitung, dia menyarankan agar *smelter* menyatu dengan kegiatan Timah dan Kobatin yang memiliki WKP, sehingga keberlangsungan tambang timah di provinsi tersebut lebih terkontrol dan memberikan nilai tambah bagi negara. "Tapi, sayangnya penanganannya lambat, padahal *smelter* tidak beroperasi lebih tiga bulan akan rusak," katanya.

Setelah penertiban *smelter* ilegal pada akhir tahun lalu, pemerintah pusat sempat melarang Timah dan Koba Tin menampung atau membeli bijih timah dari pertambangan inkonvensional (TI) atau tambang rakyat ilegal. Pemerintah akan mencajut kontrak karya jika kedua perusahaan menampung hasil tambang ilegal.

Sementara itu, pada pertengahan bulan lalu, manajemen PT Timah telah memberikan imbal jasa sebanyak 5.000 ton bijih timah seharga Rp 59 ribu per kilogram. "Kami memberikan imbal jasa, atas kegiatan penambangan yang dilakukan penambang skala kecil/tambang inkonvensional, sedangkan kewajiban lain terkait aktivitas penambangan seperti royalti dan reklamasi ditanggung Timah," kata Humas Timah Abrun Abubakar, seperti dikutip *Antara*.

Pembelian bijih timah didasarkan surat edaran gubernur Bangka Belitung, agar hasil tambang rakyat tetap bisa terjual dan ada yang menampung. Abrun menyatakan, harga pasir timah sudah disesuaikan dengan harga pasaran dunia. Harga bisa saja bergerak naik bila harga timah dipasar internasional juga meningkat.

Timah juga menyediakan dana sebesar Rp 150 miliar untuk membeli hasil pasir timah yang berasal dari tambang rakyat. "Apa yang diputuskan pemerintah sebagai regulator akan kita ikuti. Bagaimanapun hasil timah rakyat harus terjual, rakyat membutuhkan banyak biaya untuk keperluannya, sementara kolektor yang menjual ke *smelter* tidak melakukan pembelian "ujarnya. (lim)

Produksi Konsentrat dan Logam Timah 1998-2005

Tahun	Konsentrat Timah	Logam Timah
1998	57.562	43.665
1999	51.761	49.709
2000	55.654	47.129
2001	61.868	53.796
2002	88.142	67.455
2003	77.694	66.283
2004	73.079	60.697
2005	42.667	33.181

Sumber : ESDM

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B12

TAHUN 2007

### Harga nikel di London turun 2,8%

LONDON: Harga nikel di London turun 2,8%, setelah Xtrata Plc, perusahaan pemasok 4% kebutuhan logam dunia, menyetujui kontrak kerja dengan karyawannya di satu areal pertambangannya di Kanada.

"Pasar menyambut baik keputusan terakhir perusahaan, sehingga harga turun," kata Kevin Tuohy, pedagang dari Man Financial Ltd, London.

Harga nikel untuk pengiriman tiga bulanan di London Metal Exchange kemarin turun 2,8% menjadi US\$35.950 per ton. Pada perdagangan sesi pagi harga komoditas ini sempat turun 3% ke posisi US\$35.900 per ton.

Harga logam ini pernah mencapai rekor tertingginya di posisi US\$38.950 per ton pada 26 Januari 2007.

(BLOOMBERG/BES)



MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

## Pemanfaatan batu bara di Jambi belum optimal

BISNIS INDONESIA

JAMBI: Potensi batu bara Jambi yang diperkirakan 400 juta ton lebih hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara itu produksi rata-rata per tahun baru 1 juta ton.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi Rahman Poetera mengatakan potensi itu tersebar hampir di seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi dengan cadangan terbesar di daerah Muara Bungo.

Minimnya eksplorasi batu bara disebabkan kualitasnya yang relatif rendah (*low range coal*) dengan kadar kalori rata-rata 4.000 sampai 5.600 Kkal/kg dan kadar air antara 25%-40%, sehingga kurang ekonomis untuk transportasi jarak jauh.

"Kami perkirakan 75% kapasi-

tas batu bara yang ada memiliki kualitas yang rendah," kata dia kepada *Bisnis*, kemarin.

Namun, sampai saat ini sudah lebih dari 57 perusahaan yang mengusahakan batu bara tersebut dengan rincian untuk tingkat eksplorasi sebanyak 38 perusahaan, eksploitasi 11 perusahaan. Namun yang aktif melakukan kegiatan penambangan hanya empat perusahaan di Kabupaten Bungo dengan tingkat produksi sekitar 40.000

ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan PT Semen Padang.

Angka ini, menurut Rahman, masih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada. Untuk itu sangat terbuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya menggali potensi tambang tersebut.

Peluang investasi itu, kata dia, dapat dilakukan dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap di mulut tambang yang listriknya dapat

dijual ke PT PLN Cabang Jambi.

Langkah ini dinilai menguntungkan karena biaya produksi lebih murah dan bahan baku batu bara untuk menggerakkan pembangkit cukup tersedia.

"Langkah ini sangat memungkinkan karena kondisi

listrik di Jambi saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri, sehingga berapa pun besarnya kapasitas listrik yang dihasilkan dapat dibeli PLN Cabang Jambi."

Peluang yang lain juga dapat dimanfaatkan oleh investor adalah dengan menggali lalu menjual batu bara tersebut ke luar negeri, seperti halnya yang dilakukan beberapa perusahaan yang ada. (K33)

Kabupaten	Jenis Izin		Penyelidikan umum	Eksplorasi	Eksploitasi	Pengangkutan dan penjualan
	PKP2B	KP				
Sarolangun	3	5	-	6	2	-
Tebo	-	9	-	8	1	-
Batanghari	-	9	1	7	1	-
Tanjab Barat	-	5	-	4	1	-
Bungo	1	22	-	14	6	3
Jumlah	4	50	1	39	11	3

Sumber: Kepala Dinas pertambangan dan energi provinsi Jambi.

Ket. PKP2B= perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara & KP= kuasa pertambangan

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 612

TAHUN 2007

## Emas kembali ke level harga tertinggi 8,5 bulan

REUTERS/BLOOMBERG

SINGAPURA: Harga emas kembali meningkat ke level tertinggi dalam delapan setengah bulan terakhir pada posisi US\$654 per ounce, karena dipicu anjloknya kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama dunia.

Pelemahan dolar AS itu terjadi, setelah Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunganya pada level 5,25%.

Harga emas di pasar sering kali bergerak berlawanan dengan nilai tukar dolar AS terhadap euro.

Pada tahun lalu, harga emas telah meningkat 23% ketika nilai tukar dolar AS melemah 8,3% terhadap euro.

Di pasar spot harga emas diperdagangkan pada level US\$654,70 per ounce, posisi tertinggi sejak Agustus 2006. Harga emas untuk pengiriman segera naik 0,1% atau bertengger di US\$653,50 per ounce pada perdagangan sesi siang waktu Singapura.

Harga emas di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik 0,2% menjadi US\$659 per ounce. Sementara itu, di bursa berjangka Tokyo, harga logam mulia untuk pengiriman Desember 2007 naik 0,9% menja-

di 2.559 yen per gram (US\$660 per ounce)

"Kami melihat investor asing membeli emas secara agresif kemarin sejak dibukanya transaksi logam itu di Tocom," kata Louis Lok, pedagang dari Bank of China, Hong Kong.

Dia optimistis pembeli emas dari China dan Timur Tengah, yang sebenarnya sudah belanja emas pada bulan lalu, akan kembali ke pasar jika harga turun ke kisaran US\$635-US\$640 per ounce.

Harga emas pada pekan ini diprediksi dipengaruhi data ekonomi AS, termasuk laporan indeks harga konsumsi masyarakat sepanjang bulan ini, serta data tenaga kerja per Januari yang akan dirilis pada Jumat.

"Kami melihat selama data belum dirilis, pelaku pasar di Asia melakukan aksi ambil untung. Sehingga harga emas akan bertengger di kisaran US\$648-US\$660 per ounce," kata Ronald Leung, Director of Lee Cheong Gold Dealers, Hong Kong.

Selain data ekonomi AS, Leung juga memprediksi harga emas akan terpengaruh kemungkinan penjualan logam mulia itu dalam jumlah besar yang dilakukan International Monetary Fund (IMF). (BES)

46

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2007

# 'Tinjau kontrak kapal batu bara asing'

Oleh AIDIKAR M. SAIDI  
*Bisnis Indonesia*

**JAKARTA: INSA mendesak Dephub mengkaji kembali pelaksanaan Inpres No. 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, khususnya kontrak jangka panjang pengangkutan migas dan batu bara oleh kapal asing untuk diserahkan ke kapal berbendera Indonesia.**

Oentoro Surya, Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), mengungkapkan hal tersebut pada acara pertemuan silaturahmi dan diskusi interaktif *Peran INSA dalam Implementasi Inpres No. 5/2005* di Jakarta, Rabu malam.

Kebijakan yang bertujuan memberdayakan pelayaran nasional itu dinilai tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kinerja pelayaran nasional, baik penambahan jumlah kapal maupun pangsa angkutan.

Hal tersebut dinilai akibat permainan oknum untuk memperbarui kon-

trak pengapalan jangka panjang kapal asing sebelum diberlakukan Inpres No. 5/2005 pada 28 Maret 2005.

"Memang ada kemungkinan permainan itu karena Inpres No. 5/2005 sangat strategis dan menentukan sekali bagi kapal asing agar tidak kehilangan dominasinya terhadap angkutan dalam dan luar negeri. Tapi yang penting kini INSA sudah kompak dan berkolaborasi mengambil alih pangsa muatan asing," ujarnya.

Kekompakan pengurus INSA untuk fokus mencapai target pengangkutan muatan kapal didesak oleh para ope-

rator seluruh Indonesia yang diwakili 21 pengurus DPC INSA. "Inilah hikmah dari adanya persetujuan di kepengurusan pusat tentang inkonsistensi pemberian PPKA [izin penggunaan kapal asing] oleh Dephub."

Kesadaran untuk mengatasinya adalah dengan rekonsiliasi pimpinan pusat INSA dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh Oentoro dan Soenarto.

## Akhiri persetujuan

Mereka sepakat mengakhiri persetujuan perebutan kepemimpinan teratas di organisasi itu. Selain itu, Oentoro membatalkan tuntutan hukum terhadap Soenarto dan pencabutan keanggotaan 28 perusahaan pelayaran anggota INSA (*Bisnis*, 1 Februari).

"Setelah kepengurusan solid, INSA akan mengagendakan tentang perlu-

nya menambah aturan adendum dalam KM No. 71/2005, yaitu kontrak pengapalan kapal asing dikaji secara seksama untuk dialihkan ke kapal nasional,” ujar Oentoro.

Soenarto yang kembali menjabat Wakil Ketua Umum INSA, mengatakan peluang untuk mengangkut berbagai komoditas tidak hanya pada angkutan batu bara yang disinyalir didominasi kapal asing.

“Hampir semua muatan migas, muatan ekspor impor masih menggunakan kapal asing. Untuk itulah perlu ada komitmen yang lebih mengigit dari pemerintah untuk berpihak kepada pelayaran nasional,” katanya.

Muhammad Yahya Zubir sebagai ketua panitia penyelenggara pertemuan silaturahmi dan diskusi interaktif itu mengatakan kekompakan INSA sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di daerah.

“INSA yang sudah memiliki atribut positif di dunia pelayaran nasional menjadi kontra produktif dan kini semua masalah intern itu sudah dapat diatasi melalui kerja sama DPD dan semua DPC.”

Menanggapi islah di DPP INSA, Menteri Perhubungan M. Hatta Rajasa mengatakan hal itu sangat diharapkan regulator. “Saya bersyukur telah terjadi islah, karena kita memerlukan INSA yang kuat dan solid.”

Dirjen Perhubungan Laut Hastjarja Harijogi mengatakan perlu tindak lanjut konsolidasi untuk memberdayakan industri pelayaran nasional.

Menurut dia, penelusuran adanya kontrak jangka panjang kapal asing sebelum Inpres No. 5/2005 akan efektif bila ada laporan dari dunia usaha, sehingga Dephub bisa mencari solusi bukan menyudutkan oknum yang dimaksud. (*aidikar.saidi@bisnis.co.id*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB  
1 2 3 4 5 6

HALAMAN : 7

# Daerah Terima Royalti Pertambangan Rp 5,12 T

JAKARTA – Pemerintah daerah penghasil tambang mineral dan batu bara mendapatkan pembagian royalti sebesar Rp 5,12 triliun, atau 80% dari total penerimaan negara yang mencapai Rp 6,4 triliun pada 2006.

Direktur Pembinaan Usaha Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral MS Marpaung mengatakan, pemerintah daerah penghasil tambang menerima bagian 80% dari royalti dan pemerintah pusat mendapatkan 20%.

"Rinciannya, pemerintah provinsi menerima 16%, pemerintah kabupaten penghasil tambang 32%, dan 32% dibagi kepada semua kabupaten di provinsi penghasil tambang," kata MS Marpaung di Jakarta, belum lama ini.

Dia menjelaskan, dana royalti tersebut berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dipungut dari kegiatan pertambangan yang besarnya 13,5% dari produksi. Tahun 2006, PNBP royalti tambang tercatat sekitar Rp 6,4 triliun.

Besaran royalti 13,5% itu ditarik dari operator dan pemilik kontrak pertambangan batu bara dan mineral di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBPNP. "Besaran PNBPNP 13,5% itu juga sudah lebih baik dari yang berlaku sebelumnya dan yang berlaku di luar negeri sekitar 6,5-7,5%," katanya.

Sebelumnya di Banjarmasin, Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan mengkaji, apakah benar pemerintah pusat menerima bagian royalti 80% dan pemerintah daerah penghasil tambang hanya 20%. "Saya akan teliti dan kaji persoalan royalti yang perbandingan pemba-

giannya diatur berdasarkan peraturan menteri tersebut," ujar Wapres, seperti dikutip *Antara*.

Wapres menanggapi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Gusti Perdana Kesuma saat dialog dalam temu kader Partai Golkar di Rattan Inn, Banjarmasin, Senin (23/1) malam. Namun, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga meminta, daerah bisa memaklumi pemerintah pusat memerlukan

berbalik, pemerintah pusat menerima lebih besar dari pada daerah penghasil tambang, yang realisasi pembagiannya itu cuma berdasarkan peraturan menteri," ungkap Ketua Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu.

Marpaung memperkirakan, Gusti kemungkinan bukan hanya memperlakukan royalti, tapi juga penerimaan negara dari pajak (PNBP) yang ditarik dari kegiatan pertambangan. Selama ini, penerimaan PNBP lebih besar dari PNBPNP, dengan perbandingan 3,5:1%. "Tahun 2006 pendapatan PNBP dan PNBPNP dari tambang mencapai Rp 23 triliun, tapi PNBPNP hanya mengontribusi Rp 6,4 triliun," katanya.

Pemerintah pusat mendapatkan PNBP dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% bagi perusahaan tambang, pajak penghasilan (PPh) badan 25-40% terhadap perusahaan tambang yang membukukan keuntungan, dan PPh perorangan yang besarnya bervariasi tergantung besaran penghasilan karyawan perusahaan tambang. Selama ini, ketiga pajak menjadi hak penerimaan pemerintah pusat.

Karena itu, dia juga menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan royalti kegiatan tambang di wilayahnya untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah disarankan mendorong tumbuhnya industri lain untuk menunjang kegiatan pertambangan, agar mendapatkan penghasilan tambahan.

"Industri kertas, kapur, atau pasokan karyawan terlatih bisa didorong untuk mendukung kegiatan perusahaan tambang. Kemudian, pemerintah daerah bisa memungut pajak, karena itu dimungkinkan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," katanya. (lim)

Penerimaan Negara dari sektor ESDM  
(Rp Triliun)

Tahun	Sumber	Realisasi
2005	Minyak	82,73
	Gas bumi	54,94
	Pertambangan Umum	17,69
	Total	155,36
2006	Minyak	130,8
	Gas bumi	61,96
	Pertambangan Umum	20,84
	Selisih Harga ICP dengan fee Kontraktor	7,3
	Total	220,9

Sumber : ESDM

anggaran besar untuk membiayai pembangunan nasional yang ruang lingkupnya lebih besar.

Gusti Perdana Kesuma mengemukakan, sesuai perundangan-undangan dari royalti batu bara yang besarnya 13,5%, pemerintah daerah penghasil tambang seharusnya berhak mendapatkan bagian 80% dan pemerintah pusat hanya 20%. "Selama ini perbandingannya justru

48

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN <b>FEB</b> MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES . 1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 22		
TAHUN 2007		

PERTAMBANGAN

## 17 dari 37 "Smelter" Timah di Babel Ajukan Izin Operas

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Terhitung 20 hari sejak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan bahwa pabrik peleburan atau *smelter* timah diberi kesempatan beroperasi kembali, 17 *smelter* dari total 37 *smelter* swasta di daerah itu telah mengajukan izin operasional. Dalam waktu dekat, lima izin ope-

rasional *smelter* pun akan diterbitkan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Belitung (Babel) Amrullah Harun menyatakan hal itu hari Kamis (1/2) di Pangkal Pinang. Ia menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan verifikasi *smelter* yang mengajukan izin operasionalnya kembali.

"Dari 17 *smelter*, memang baru lima yang akan segera keluar izinya. Namun, saya tidak bisa perinci *smelter* apa saja sebelum ditandatangani izin operasionalnya oleh gubernur," kata Amrullah.

Penutupan *smelter* sebagai langkah penertiban sektor tambang timah di Babel sudah ber-

langsung sejak awal Oktober 2006. Tak kurang dari 200.000 karyawan dan pekerja tambang konvensional (TI) terganggu mata pencaharian mereka akibat penertiban tersebut.

Persyaratan yang ditetapkan gubernur meliputi 10 poin, antara lain *smelter* harus memiliki kuasa pertambangan pemurnian dan

pengolahan, analisis mengenai dampak lingkungan, kandungan timah minimal 99,85 persen, serta wajib membayar royalti.

Ketua Tim Terpadu Penataan Usaha Pertambangan Timah Babel Suyardi Saman mengatakan, dari pengecekan teknis terhadap 37 *smelter*, hanya 10 *smelter* yang dinilai memenuhi syarat. (AND)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	<b>FEB</b>	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 17												TAHUN 2007																		

**KILAS**

**Resource Alam Geluti  
Bisnis Batu Bara**

**JAKARTA (SINDO)** - PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) yang dulunya bernama PT Kurnia Kapuas Utama Tbk akan mendiversifikasikan usaha ke bidang pertambangan batu bara. Pasalnya, industri perkayuan yang digeluti perseroan saat ini sedang mengalami penurunan, padahal sektor perkayuan menyumbang pendapatan yang cukup besar ke usaha perseroan.

Searah dengan diversifikasi tersebut, untuk tahun ini dan selanjutnya, perseroan akan lebih memfokuskan pada aktivitas anak perusahaan PT Insani Bara Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Perusahaan Resource Alam Indonesia Surya Tjahaja dalam laporannya kepada Bursa Efek Surabaya, kemarin.

Surya mengatakan, dengan diversifikasi usaha tersebut, perseroan optimistis kontribusi penjualan Insani Bara Perkasa akan mendongkrak kinerja di masa mendatang. Menurut dia, sulitnya industri perkayuan yang terjadi saat ini membuat perseroan terpaksa menutup pabrik lem kayu (*glue*) di Pontianak, Kalimantan.

Saat ini, lanjut dia, perseroan masih mengoperasikan pabrik *high pressure laminate* yang juga berlokasi di Pontianak dan beberapa pabrik *glue* yang berada di Palembang. "Berdasarkan data finansial tahun 2005, secara persentase, pabrik *glue* di Pontianak mengontribusi 31% dari seluruh penjualan perseroan," tambah dia.

(rakhmat baihaqi)

50